

FAKTOR PENGARUH DAN ANALISIS KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

Tri Rena Mayasari
Fungsional Statistisi Pertama BPS Kabupaten Pesawaran
Email : tri.mayasari@bps.go.id

Abstrak

Lampung merupakan Provinsi yang memiliki persentase kemiskinan diatas rata-rata persentase kemiskinan Nasional. Adanya permasalahan kemiskinan di Provinsi Lampung akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak ketidakstabilan sosial, ketidakpastian, dan tragedi kemanusiaan seperti kelaparan, tingkat kesehatan yang rendah dan gizi buruk. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian analisis kemiskinan dan faktor yang memengaruhinya untuk dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan kemiskinan di Provinsi Lampung dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan tersebut. Dalam penelitian ini, dibangun model Regresi Linier Berganda atas pengaruh antara kondisi daerah, Penciptaan lapangan kerja, Pendapatan Perkapita dan Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Hasil analisis menunjukkan bahwa Penciptaan lapangan kerja berpengaruh paling besar dalam penurunan kemiskinan. Peningkatan Pendapatan perkapita juga signifikan menurunkan persentase kemiskinan. Dari hasil analisis ini, Pemerintah Provinsi Lampung disarankan untuk menyusun kebijakan yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja yang masif agar mempercepat penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Kata Kunci : Kemiskinan, Regresi, Lapangan Kerja

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang tidak henti-hentinya dibicarakan dan diupayakan pemberantasannya. Menurut Gunawan Sumodiningrat dkk (1999:1), kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan, yang keberadaannya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

Berdasarkan konsep Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penghitungan angka kemiskinan, pengukuran kemiskinan dilakukan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang disetarakan dengan 2100 kalori per orang per hari. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan digunakan untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Sistem distribusi pendapatan nasional yang tidak pro kemiskinan menjadi isu bagi mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah dengan keyakinan bahwa sistem distribusi pendapatan sangat menentukan bagaimana pendapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan bernegara, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Badan Pusat Statistik mencatat nilai Gini Ratio pada September 2017 sebesar 0,391. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan Nasional masih belum merata. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak pro kemiskinan hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja, sehingga ini menjadi isu sangat penting dalam menyikapi tingginya angka kemiskinan hingga saat ini.

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang utama untuk menuju Pulau Sumatera. Dengan letak strategisnya karena provinsi ini menjadi sentral penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, seharusnya Provinsi Lampung mampu menjadi penopang sumber daya dari Pulau Sumatera. Namun demikian, secara aspek ekonomi, Provinsi Lampung masih berada dibawah rata-rata Provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Provinsi Lampung merupakan provinsi termiskin ketiga setelah Provinsi Aceh dan Bengkulu di Pulau Sumatera. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 13,69 persen. Meskipun selama dekade ini tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung cenderung menurun, namun tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung selalu berada diatas tingkat kemiskinan Nasional.

Berlandaskan pada fakta yang ada, kajian mengenai kemiskinan dan faktor-faktor yang bergulir dibaliknya menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung dan untuk melihat pengaruh pengangguran, PDRB Per kapita, IPM dan karakteristik daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2017. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel PDRB Per kapita, IPM, TPT dan klasifikasi daerah (Kabupaten/Kota) terhadap persentase kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan menggunakan model Regresi Linier Berganda (RLB). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2017 dan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017. Unit observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel. Variabel Penelitian

Variabel	Nama Variabel
x_1	PDRB per kapita
x_2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
x_3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
x_4	Klasifikasi Daerah (Kabupaten/Perkotaan)
Y	Persentase Penduduk Miskin (P0)

Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pendekatan ini dapat dihitung melalui Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana pendapatan tahunan individu di suatu daerah tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di wilayah tersebut. Individu yang hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (baik negara atau wilayah yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk wilayah tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita memainkan peranan penting dalam mengurangi kemiskinan.

Tingkat Pengangguran

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi income poverty rate dengan consumption poverty rate.
2. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan

kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka (Lincoln Arsyad, 1997).

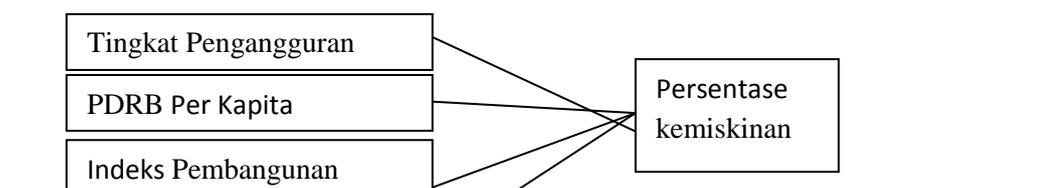
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) , dalam indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimesnsi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Dengan demikian, secara teoritis, Apabila suatu daerah memiliki IPM yang tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan pembangunan di suatu daerah tersebut juga akan semakin baik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita

PDRB Per kapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Kerangka Pikir



Klasifikasi Kabupaten/Kota

Metode Analisis

Untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita dan klasifikasi Kabupaten/Kota terhadap variabel dependen yaitu persentase penduduk miskin maka penulis menggunakan analisis regresi Linier berganda. Adapun persamaan regresi Linier Berganda dalam penelitian dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan :

Y: Merupakan variabel dependen yaitu persentase penduduk miskin

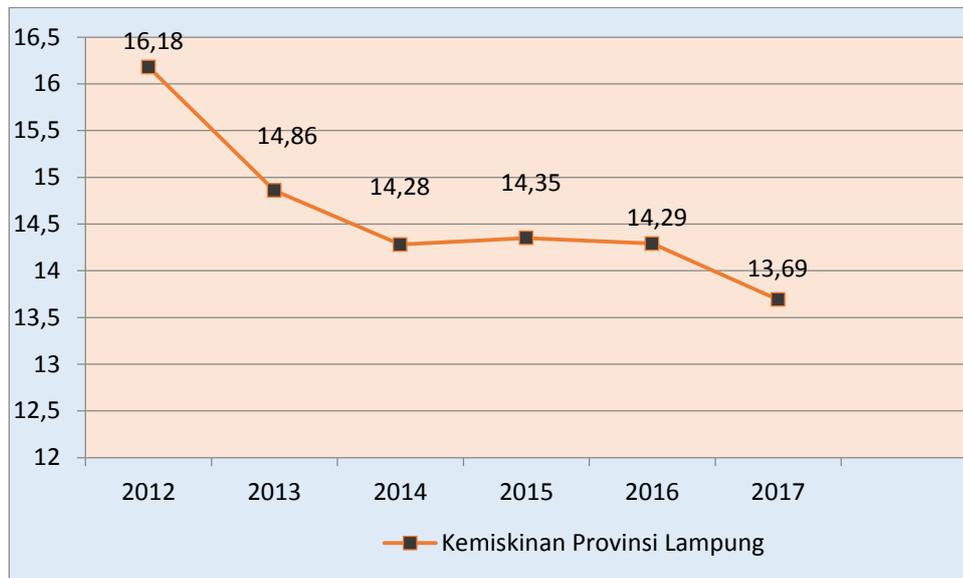
a : merupakan konstanta variabel Y apabila variabel independen sama dengan Nol

X_1, X_2, X_3, X_4 : merupakan variabel independen

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran umum Kemiskinan di Provinsi Lampung

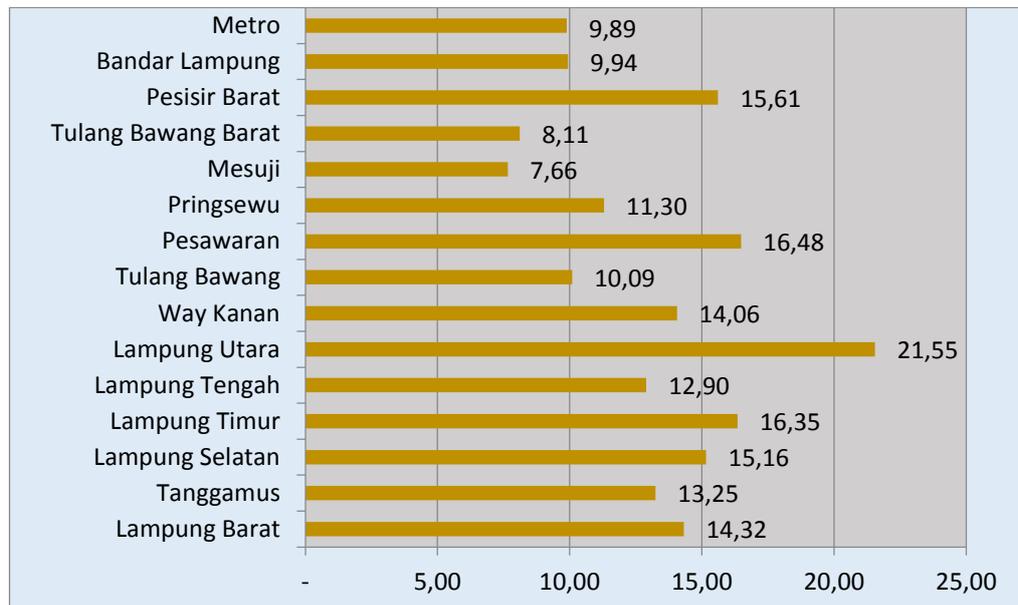
Penurunan persentase penduduk miskin di suatu daerah seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah setempat. Selama tujuh tahun terakhir, Persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung mengalami penurunan.



Gambar 1. Perkembangan Persentase kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017

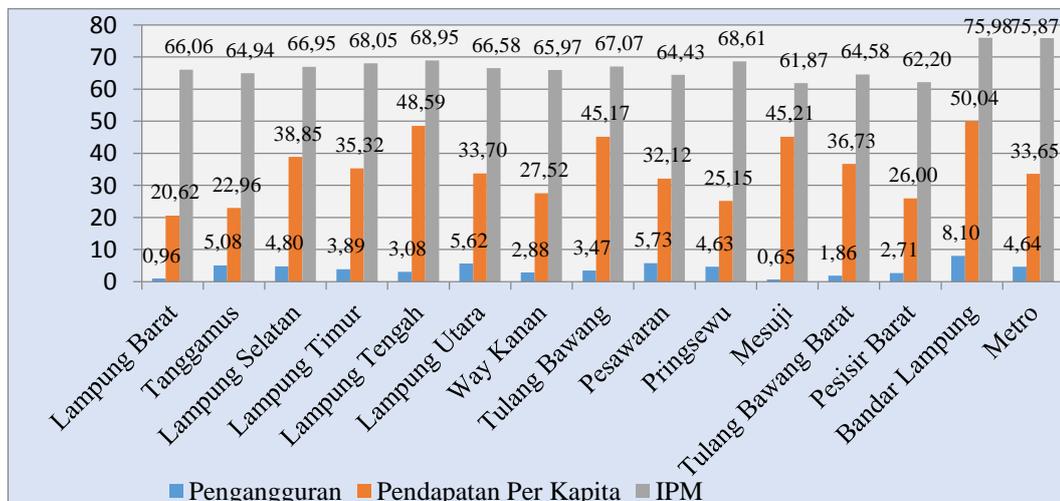
Pada tahun 2012, Penduduk miskin di Provinsi Lampung sebanyak 1.253.830 jiwa penduduk atau sebesar 16,18 persen dari total penduduk Provinsi Lampung. Jumlah penduduk miskin tersebut terus mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 1.131.730 jiwa penduduk atau sebesar 13,69 persen.

Tingginya persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung, tidak terlepas dari tingginya jumlah penduduk miskin di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berikut gambaran persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2017.



Gambar 2. Perbandingan persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017

Berdasarkan gambar 2 diatas, Kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar adalah Kabupaten Lampung utara yaitu sebesar 21,55 persen. Kemudian Kabupaten Pesawaran sebesar 16,48 persen. Tiga Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan terendah yaitu Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat dan dan Tulang Bawang, masing-masing sebesar 7,66 persen, 8,11 persen dan 10,09 persen. Sementara itu, Wilayah perkotaan yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang relatif rendah , yaitu sebesar 9,94 persen dan 9,89 persen.



Gambar 3. Perbandingan Pengangguran, Pendapatan per kapita dan IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017

Berdasarkan Gambar 3 diatas, wilayah perkotaan memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan wilayah Kabupaten. Tingginya angka IPM di Perkotaan menunjukkan adanya sarana dan prasarana yang lebih memadai di wilayah perkotaan. Angka IPM Kota Bandar Lampung dan Metro masing-masing sebesar 75,98 dan 75,87. Sedangkan angka IPM di Kabupaten berkisar 61,87 sampai 68,95. Kabupaten yang memiliki IPM terendah adalah Kabupaten Mesuji sedangkan IPM Tertinggi adalah Kabupaten Lampung Tengah.

Pendapatan Per kapita Provinsi Lampung pada tahun 2017 sebesar 37,12 juta Rupiah. Artinya, secara umum, rata-rata setiap penduduk Provinsi Lampung dapat memproduksi nilai tambah sebesar 37,12 juta rupiah dalam setahun. Pendapatan per kapita tertinggi di Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Mesuji, masing-masing sebesar 50,04 juta; 48,59 juta dan 45,21 juta rupiah per tahun. Sedangkan pendapatan per kapita terendah adalah Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus dan Pringsewu, masing-masing sebesar 20,62 juta; 22,96 juta dan 25,15 juta rupiah per tahun.

Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Lampung sebesar 4,33 persen. Artinya, dari 100 penduduk usia kerja yang merupakan angkatan kerja, terdapat 4 sampai 5 penduduk yang menganggur. Tingkat pengangguran sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Ketidakmampuan penduduk dalam mencari pekerjaan akan berimbas pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran dan Lampung Utara, masing-masing yaitu 8,10 persen, 5,73 persen dan 5,62 persen. Sedangkan Kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran terendah adalah Kabupaten Mesuji, Lampung Barat dan Tulang Bawang Barat, masing-masing sebesar 0,65 persen; 0,96 persen dan 1,86 persen.

b. Estimasi Model Regresi Linier Berganda

Setelah variabel Independen diregresikan dengan variabel dependen, diperoleh hasil sebagai berikut:

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,599	4	,150	2,685	,094 ^a
	Residual	,558	10	,056		
	Total	1,157	14			

a. Predictors: (Constant), xdummy, x2, x1, x3

b. Dependent Variable: y1

Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara simultan melalui uji F, Variabel tingkat pengangguran (X_1), Pendapatan per kapita (X_2), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_3) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung secara bersama-sama berpengaruh terhadap Angka Kemiskinan di Masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2017. Hal ini terlihat dari nilai probabilita signifikansi sebesar 0,094. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditentukan sebesar ($\alpha=10\%$).

Sedangkan untuk melihat pengaruh secara sendiri-sendiri atau parsial digunakan uji t-test. Dengan tingkat kepercayaan 90% ($\alpha=10\%$), maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0 : b_i=0$ (tingkat pengangguran, PDRB Per kapita dan IPM secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung)

$H_a : b_i \neq 0$ (terdapat pengaruh antara tingkat pengangguran, PDRB Per kapita dan IPM secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung)

Hasil pengujian t-test tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,825	9,777		,187	,856					
	x1	,245	,113	,583	2,167	,055	,390	,565	,476	,657	1,500
	x2	-,328	,240	-,316	-1,363	,203	-,391	-,396	-,299	,897	1,115
	x3	,287	2,299	,059	,125	,903	-,156	,039	,027	,215	4,648
	xdummy	,422	,346	,516	1,219	,251	,341	,360	,268	,269	3,718

a. Dependent Variable: y1

Berdasarkan tabel di atas, Hasil t_{hitung} variabel tingkat pengangguran (X_1) pada nilai signifikansi sebesar 0,055 yang lebih kecil dari 0,10 membuktikan bahwa variabel tingkat pengangguran (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan (Y) di Provinsi Lampung, dengan asumsi variabel PDRB Per kapita (X_2) dan IPM (X_3) tetap. Sedangkan untuk ketiga variabel lainnya, secara statistik tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.

Model regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 1,825 + 0,245X_1 - 0,328X_2 + 0,287X_3 - 0,422Dummy$$

Interpretasi model:

- a. Peningkatan lapangan kerja sebesar 1 persen, akan menurunkan 0,245 persen tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Dengan asumsi variabel lainnya (PDRB Per kapita, IPM dan Klasifikasi daerah tetap). Variabel ini merupakan variabel yang paling signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Adanya peningkatan lapangan kerja sangat erat kaitannya dengan penurunan kemiskinan. Dengan menambah lapangan kerja, maka Pemerintah Daerah dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

- b. Peningkatan PDRB Per kapita sebesar satu persen, akan menurunkan 0,328 persen tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Dengan asumsi variabel lainnya (Tingkat pengangguran, IPM dan klasifikasi daerah) tetap. Konstanta PDRB Per kapita merupakan konstanta yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan variabel PDRB Per kapita paling banyak pengaruhnya untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
- c. Peningkatan IPM sebesar satu persen, akan menambah 0,287 persen tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Dengan asumsi variabel lainnya (Tingkat pengangguran, PDRB Per kapita dan Klasifikasi daerah) tetap. Hal ini tidak sesuai dengan teori, dimana seharusnya semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka tingkat kemiskinan tersebut akan semakin berkurang.
- d. Sedangkan variabel dummy sebesar (-0,422) berarti bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten lebih tinggi 0,422 persen dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah Perkotaan.

4. SIMPULAN

Secara umum, variabel tingkat pengangguran, PDRB per kapita, IPM dan klasifikasi wilayah Kabupaten atau perkotaan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2017. Variabel yang signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan adalah tingkat pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan lapangan kerja sangat dibutuhkan untuk penurunan tingkat kemiskinan. Dilihat dari nilai konstanta model Regresi yang terbentuk, maka PDRB Per kapita merupakan variabel yang paling besar nilainya. Jadi, peningkatan PDRB per kapita akan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2017)..*Indikator Kesejahteraan Rakyat 2017*. Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Basri F.H. (1995). *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI : Distorsi, Peluang dan Kendala*. Jakarta:Erlangga.
- Badan Pusat Statistik (2017)..*Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2017*. Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik (2017)..*Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017*. Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Yarlina Yacoub (2012). *Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Diakses dari http://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/06-eksos%204%20Yarlina%20okt12.pdf.

Nadia Ika Purnama (2017). *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/163054-ID-analisis-pengaruh-pertumbuhan-ekonomi-te.pdf>.*